

IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN PEMERINTAH

(STUDI KASUS PADA BKPSDM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)

Safrizan¹; Zuhrial M Nawawi²; Hendra Harmain³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan^{1,2,3}

Email : safrizan1001@gmail.com¹; zuhrial.nawawi@uinsu.ac.id²;

hendra.harmain@uinsu.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kendala teknis dan keterbatasan pelatihan pegawai masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi sistem ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengandalkan data primer dari wawancara serta data sekunder dari dokumentasi dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan keuangan, tantangan teknis dan kesiapan sumber daya manusia masih menjadi kendala signifikan. Kesimpulannya, implementasi sistem akuntansi berbasis akrual tidak hanya memerlukan reformasi teknologi tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mencapai efektivitas optimal.

Kata Kunci : Akuntansi Akrual; Pelaporan Keuangan; Transparansi; Optimalisasi

ABSTRACT

This study examines the implementation of an accrual-based accounting system at BKPSDM, Southwest Aceh Regency, in improving the quality of financial reporting. Technical constraints and limited employee training remain significant obstacles to optimizing this system. This research employs a qualitative case study approach, utilizing primary data from interviews and secondary data from documentation and financial reports. The findings indicate that while the system enhances transparency and accuracy in financial recording, technical challenges and human resource readiness continue to pose significant barriers. The study concludes that the successful implementation of an accrual-based accounting system requires not only technological reforms but also strengthening institutional capacity and human resources to achieve optimal effectiveness.

Keywords : Accrual Accounting; Financial Reporting; Transparency; Optimization

PENDAHULUAN

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pemerintahan daerah merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan. BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengadopsi sistem ini guna memperbaiki pencatatan keuangan serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala teknis seperti

masalah koneksi internet dan server error yang menghambat proses pencatatan keuangan secara real-time. Selain itu, kurangnya pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memadai bagi pegawai keuangan menjadi faktor lain yang menghambat optimalisasi sistem ini. Penyesuaian anggaran dilakukan, dengan penurunan total anggaran dari Rp 6.717.912.741 pada tahun 2021 menjadi Rp 4.121.452.627 pada tahun 2024 serta pengurangan jumlah program dari 3 menjadi 2, turut mempengaruhi efektivitas pelaporan keuangan. Meskipun sistem ini telah diintegrasikan dengan aplikasi SIPD, temuan audit tahun 2021 dan 2023 mengindikasikan masih diperlukan perbaikan dalam penerapannya (Kuroki et al., 2022).

Secara konseptual, akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dengan mencatat transaksi saat terjadi, bukan hanya ketika kas diterima atau dikeluarkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan sistem ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Christofzik, 2019). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa adopsi sistem ini tidak selalu memberikan manfaat yang diharapkan, terutama jika tidak didukung oleh reformasi kelembagaan yang memadai (Cohen et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tindak lanjut terhadap rekomendasi audit serta efektivitas sistem akuntansi dalam mencegah manipulasi keuangan (Furqan et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya, mengidentifikasi faktor penghambat optimalisasi sistem, serta menilai dampak penyesuaian anggaran terhadap kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi strategi peningkatan efektivitas sistem akuntansi melalui pelatihan pegawai, penguatan infrastruktur TI, serta perbaikan manajemen keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien (Ismail, 2023).

Berdasarkan fakta yang telah disajikan, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya sistem ini, transparansi keuangan diharapkan meningkat, namun tantangan yang muncul memerlukan strategi yang lebih efektif agar sistem dapat

berfungsi secara optimal. Dengan menelaah berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu, serta melakukan analisis mendalam terhadap kasus BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan literatur terkait implementasi akuntansi berbasis akrual dalam pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi sistem akuntansi di sektor publik (Mbelwa et al., 2019).

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Sistem akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi keuangan pada saat kegiatan ekonomi terjadi, bukan hanya ketika terjadi penerimaan atau pengeluaran kas (Andriasari & Prabowo, 2022). Penerapan sistem ini di sektor publik, terutama pada pemerintahan daerah, bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat melaporkan secara lebih menyeluruh terkait aset, kewajiban, pendapatan, serta beban dibandingkan dengan system (Bergmann et al., 2019). Laporan keuangan yang dihasilkan pun mampu mencerminkan kondisi keuangan yang lebih realistis, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan memperkuat akuntabilitas kepada publik (Sari & Wahyuni L, 2022).

Akuntansi berbasis akrual memiliki beberapa kategori utama yang mencerminkan prinsip dan aplikasinya dalam sektor publik. Pertama, terdapat akrual penuh yang mencatat semua transaksi, baik yang terkait dengan aset, kewajiban, pendapatan, maupun beban, sesuai dengan standar akuntansi sektor publik internasional (IPSAS). Kedua, terdapat akrual modifikasi yang menggabungkan prinsip akrual dengan unsur-unsur akuntansi berbasis kas, biasanya digunakan di beberapa negara yang masih dalam tahap transisi menuju sistem akrual penuh (Christofzik, 2019). Ketiga, terdapat model hibrida yang memungkinkan entitas untuk mencatat beberapa elemen dalam basis akrual sementara lainnya masih dicatat dalam basis kas (Cohen et al., 2019).

Pelaporan keuangan di sektor publik memiliki peran penting dalam menyediakan data yang relevan dan dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan guna mendukung proses pengambilan keputusan (Sitio et al., 2023). Standar pelaporan keuangan yang diterapkan dalam sistem akuntansi berbasis akrual memastikan bahwa informasi yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan

memudahkan evaluasi kinerja organisasi publik (Siregar et al., 2024). Dengan sistem ini, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah mengelola sumber daya publik dengan efektif dan efisien (Haustein et al., 2021).

Pelaporan keuangan sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, tergantung pada tingkat transparansi dan akuntabilitas yang ingin dicapai. Salah satu bentuk utama adalah laporan posisi keuangan, yang mencerminkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, terdapat laporan arus kas yang memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas dalam operasional pemerintahan (Cohen et al., 2019). Selain itu, laporan kinerja keuangan juga digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian tujuan organisasi publik (Mbelwa et al., 2019).

Transparansi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara (Az-Zahra et al., 2023). Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah yang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual cenderung memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang masih menggunakan sistem berbasis kas (Cuadrado-Ballesteros et al., 2020). Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat mengevaluasi penggunaan anggaran secara lebih objektif dan akurat.

Transparansi dalam pelaporan keuangan dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, transparansi aktif, yaitu ketika pemerintah secara proaktif menyediakan laporan keuangan dan informasi anggaran kepada publik melalui berbagai platform, seperti situs web resmi atau laporan tahunan. Kedua, transparansi pasif, yang mengacu pada kesiapan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan ketika diminta oleh masyarakat atau lembaga pengawas (Mkasiwa, 2022). Transparansi dalam pelaporan keuangan publik sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada

(Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini berfokus pada implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya. Fenomena yang diamati adalah kendala teknis dan administratif yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi ini, termasuk masalah koneksi internet dan server, serta keterbatasan pelatihan bagi pegawai yang berpengaruh terhadap efektivitas pencatatan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga meneliti dampak penyesuaian anggaran dan struktur program terhadap kualitas pelaporan keuangan di BKPSDM, yang ditandai dengan penurunan jumlah program dan temuan audit yang masih terjadi meskipun sistem telah diintegrasikan melalui aplikasi SIPD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan investigasi mendalam terhadap satu unit analisis, yakni BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya (Huda et al., 2023). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di BKPSDM, seperti Sekretaris BKPSDM, Bendahara, dan Asisten Bendahara, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah.

Adapun informan kunci dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya. Informan pertama, Junaidi, selaku Sekretaris BKPSDM, memiliki tanggung jawab atas kebijakan dan implementasi sistem secara keseluruhan. Informan kedua adalah Safrahadi merupakan Bendahara BKPSDM, yang memiliki pengalaman langsung dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, termasuk pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Informan ketiga adalah Agus Satria Rezeki selaku Asisten Bendahara yang membantu dalam pengelolaan keuangan harian, berperan dalam penyusunan laporan keuangan bulanan serta pemantauan pelaksanaan anggaran.

Proses penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari pengumpulan data hingga analisis dan interpretasi hasil. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan

perspektif informan mengenai implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. Observasi langsung dilakukan untuk melihat bagaimana sistem ini diterapkan dalam praktik sehari-hari dan mengidentifikasi kendala yang muncul. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan hasil audit yang relevan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola temuan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan, dengan melakukan triangulasi untuk memastikan validitas hasil penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria evaluasi, yaitu kredibilitas, ketergantungan, transferabilitas, dan konfirmabilitas, sehingga hasil penelitian ini dapat dipercaya dan memiliki relevansi dalam konteks yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Akuntansi berbasis akrual telah diterapkan di BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa sistem ini telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD yang memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time. Namun, kendala teknis masih sering terjadi, terutama terkait dengan masalah koneksi internet dan server error yang menghambat akses aplikasi. Selain itu, masih terdapat beberapa aspek pencatatan, seperti realisasi fisik dan penggunaan CALK, yang dilakukan secara manual. Hal ini berdampak pada efisiensi pelaporan keuangan dan menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan.

Kutipan Langsung: "Integrasi data dalam SIPD memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap anggaran, karena setiap transaksi langsung tercatat, sehingga ketika SPM dikeluarkan, rekapitulasi keuangan pun muncul secara otomatis. Namun, kendala teknis berupa server error dan masalah koneksi internet sering menghambat akses aplikasi." (Saiful Junaidi, Sekretaris BKPSDM)

Eksplanasi lebih lanjut menunjukkan bahwa permasalahan teknis yang muncul tidak hanya berdampak pada kecepatan akses, tetapi juga mempengaruhi akurasi data yang tercatat. Kesalahan dalam pencatatan akibat gangguan teknis mengakibatkan perlunya verifikasi ulang terhadap transaksi yang telah dilakukan. Hal ini menambah beban kerja bagi bendahara dan tim keuangan, serta memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan keuangan. Selain itu, keterbatasan pelatihan pegawai dalam mengoperasikan sistem baru juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini.

Relasi antara permasalahan teknis dan implementasi akuntansi berbasis akrual dapat dilihat dalam konteks realitas organisasi. Meskipun sistem ini telah dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, keterbatasan infrastruktur teknologi serta kesiapan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa kesalahan pencatatan keuangan mengalami penurunan dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya, di mana kesalahan pencatatan dapat mencapai 10% dari total transaksi. Dengan penerapan sistem berbasis akrual, kesalahan ini berhasil ditekan secara signifikan.

Kutipan Langsung: "Dulu, dalam sistem manual, tingkat kesalahan pencatatan bisa mencapai sekitar 10%, tetapi sekarang dengan sistem baru, setiap transaksi langsung terekam dengan benar sehingga kesalahan hampir tidak terjadi." (Safrahadi, Bendahara BKPSDM)

Pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur sejak penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, ditemukan bahwa laporan keuangan kini dapat diakses secara terbuka melalui website resmi BKPSDM selama empat tahun terakhir. Hal ini mencerminkan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak tahun 2021 menunjukkan dampak langsung terhadap pelaporan keuangan. Penyesuaian anggaran yang dilakukan, dari Rp6,717 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp4,121 miliar pada tahun 2024, menyebabkan pengurangan jumlah program dari tiga menjadi dua. Hal ini menuntut efisiensi pengelolaan keuangan dan pencatatan anggaran.

Kutipan Langsung: "Sekarang laporan keuangan sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui website BKPSDM, sehingga lebih transparan. Dulu, publikasi

laporan keuangan tidak dilakukan secara terbuka seperti ini." (Agus Satria Rezeki, Asisten Bendahara)

Keterkaitan antara transparansi keuangan dan kebijakan efisiensi mengindikasikan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual membawa pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola keuangan di tingkat pemerintah daerah. Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan anggaran dengan lebih optimal serta memperkuat akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, keberhasilan penerapannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut secara efektif. Namun, efektivitas sistem ini masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem yang ada. Tabel 1 menunjukkan Temuan Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan ketepatan dalam penyajian laporan keuangan (Sari & Wahyuni L, 2022). Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kendala teknis yang menghambat pencatatan keuangan secara real-time dan keterbatasan pelatihan pegawai yang berkontribusi terhadap kesalahan dalam pengelolaan data keuangan (Subhi & Yuhertiana, 2021). Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang mengurangi jumlah program dari tiga menjadi dua juga berdampak terhadap pelaporan keuangan, meskipun secara keseluruhan sistem akuntansi berbasis akrual telah mengurangi tingkat kesalahan pencatatan dibandingkan dengan sistem sebelumnya (Safari et al., 2024).

Dalam kaitannya dengan penelitian lain, studi ini memperkuat temuan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pemerintahan daerah mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan (Kuroki et al., 2022). Penelitian ini juga sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem akuntansi akrual bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia (Ismail, 2023). Namun, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan spesifik yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya, seperti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Refleksi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi berbasis akrual tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi baru, tetapi juga memerlukan perubahan dalam manajemen keuangan dan budaya organisasi (Fibriani & Deviani, 2025). Dengan adanya transparansi yang lebih tinggi, pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur, tetapi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kompetensi pegawai, sistem ini tidak akan mencapai efektivitas maksimal (Ginanjari, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memahami dan mengoperasikan sistem ini menjadi faktor yang sangat krusial (Andriasari & Prabowo, 2022).

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya kebijakan yang lebih strategis dalam mendukung optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual (Desmawan & Nofianti, 2024). Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa reformasi akuntansi ini tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Pratama et al., 2024). Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi menjadi langkah yang perlu diprioritaskan agar implementasi sistem ini dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka Panjang (Putra & Varina, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual sangat bergantung pada kesiapan teknis dan administratif (Sari & Kusmilawaty, 2023). Tantangan yang dihadapi, seperti kendala server dan keterbatasan pelatihan pegawai, memperlihatkan bahwa reformasi sistem akuntansi ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Faktor kelembagaan dan kebijakan anggaran juga menjadi elemen penting dalam menentukan efektivitas penerapan sistem ini, sebagaimana ditemukan dalam studi sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi reformasi akuntansi sektor publik (Furqan et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian ini, langkah yang perlu diambil adalah penguatan kebijakan dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual melalui peningkatan kapasitas pegawai dan modernisasi infrastruktur teknologi. Pelatihan yang lebih intensif dan metode pembelajaran yang lebih interaktif dapat membantu pegawai dalam memahami sistem ini secara lebih mendalam (Nurlaila & Susilo, 2021). Selain itu, investasi dalam peningkatan infrastruktur TI, termasuk perbaikan server dan peningkatan kualitas

jaringan internet, sangat diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Dengan strategi ini, diharapkan sistem akuntansi berbasis akrual dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa meskipun sistem akuntansi berbasis akrual telah diterapkan di BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan, kenyataannya kendala teknis dan keterbatasan pelatihan pegawai masih menjadi hambatan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi akuntansi canggih tidak serta-merta meningkatkan efektivitas pelaporan tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Lebih dari itu, meskipun sistem ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pencatatan, masih terdapat temuan audit yang mengindikasikan bahwa faktor manusia dan kebijakan internal memainkan peran yang tidak kalah penting dalam keberhasilan implementasi sistem ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam dua aspek utama, yaitu teori dan praktik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di sektor publik dengan menyoroti bahwa keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya peningkatan kapasitas pegawai dan modernisasi infrastruktur dalam mendukung optimalisasi sistem akuntansi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lain yang tengah mengadopsi sistem serupa agar dapat mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul.

Meskipun penelitian ini berhasil memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi sistem akuntansi berbasis akrual, ruang pengembangan lebih lanjut tetap terbuka. Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya mencakup satu instansi pemerintahan daerah, sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan dengan membandingkan implementasi sistem serupa di berbagai daerah, serta mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem akuntansi berbasis akrual dalam konteks pemerintahan yang lebih luas.

PENGHARGAAN/UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini diberikan kepada penulis untuk menyampaikan terima kasih baik kepada para penyandang dana penelitian maupun pihak lain yang telah berkontribusi dalam realisasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriasari, W. S., & Prabowo, A. (2022). Analisa Keberhasilan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Magelang. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 19(1), 101–110. <https://doi.org/10.37476/akmen.v19i1.1871>
- Az-Zahra, S. F., Nurbaiti, & Syafina, L. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. *JRKA*, 9(1), 146–167.
- Bergmann, A., Fuchs, S., & Schuler, C. (2019). A theoretical basis for public sector accrual accounting research: current state and perspectives. *Public Money and Management*, 39(8). <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1654319>
- Christofzik, D. I. (2019). Does accrual accounting alter fiscal policy decisions? - Evidence from Germany. *European Journal of Political Economy*, 60. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.07.003>
- Cohen, S., Manes Rossi, F., Caperchione, E., & Brusca, I. (2019). Local government administration systems and local government accounting information needs: is there a mismatch? *International Review of Administrative Sciences*, 85(4). <https://doi.org/10.1177/0020852317748732>
- Cuadrado-Ballesteros, B., Citro, F., & Bisogno, M. (2020). The role of public-sector accounting in controlling corruption: an assessment of Organisation for Economic Co-operation and Development countries. *International Review of Administrative Sciences*, 86(4). <https://doi.org/10.1177/0020852318819756>
- Desmawan, D., & Nofianti, N. (2024). Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Pada Kementerian Sosial RI. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 15(1), 37–48.
- Fibriani, R., & Deviani. (2025). Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7(1), 370–387.
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5). <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Ginanjari, M. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI di DPMPSTP Kota Palopo. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(2), 182–192. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i2.2512>
- Haustein, E., Lorson, P. C., Oulasvirta, L. O., & Sinervo, L. M. (2021). Perceived usability of local government (LG) financial statements by local councillors: comparative study of Finland and Germany. *International Journal of Public Sector Management*, 34(4). <https://doi.org/10.1108/IJPSM-09-2020-0227>
- Huda, M. N., Ismunarti, D. H., Fadli, Z. A., Mohamad, K. G. S., Putri, Z. A. T., & Yusuf, I. M. (2023). Empowering Small-Medium Enterprises for Developing Local Business: Case Study in Sub-district of Karanggede, Regency of Boyolali.

- International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(11), 153. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i11.5206>
- Ismail, S. (2023). Perception of the Malaysian Federal Government accountants of the usefulness of financial information under an accrual accounting system: a preliminary assessment. *Meditari Accountancy Research*, 31(3), 658–674. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-04-2020-0845>
- Kuroki, M., Ishikawa, K., & Yamamoto, K. (2022). Understanding the impact of mandatory accrual accounting on management practices: interpretation of Japanese local governments' behavior. *International Review of Administrative Sciences*, 88(3). <https://doi.org/10.1177/0020852321988956>
- Mbelwa, L. H., Adhikari, P., & Shahadat, K. (2019). Investigation of the institutional and decision-usefulness factors in the implementation of accrual accounting reforms in the public sector of Tanzania. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 9(3). <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2018-0005>
- Mkasiwa, T. A. (2022). The magic of IPSAS accrual: the real without reality. *International Journal of Public Sector Management*, 35(6). <https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2021-0238>
- Nurlaila, A., & Susilo, G. F. A. (2021). Evaluasi Penggunaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) di Pengadilan Negeri Mungkid. *Jurnal Ekobisman*, 5(3), 1689–1699.
- Pratama, E. A., Sinadela, S., & Gushendarto, G. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi). *ECOMA: Journal of Economics and Management*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.55681/ecoma.v2i1.38>
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Safari, M. D. E. T., Putri, A. N., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(5), 3036–3040.
- Sari, A., & Kusmilawaty, K. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan Yang Berkualitas (Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards to Realize Quality Financial Reports). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1). <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1185>
- Sari, A., & Wahyuni L, A. (2022). Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Kinerja SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 59–66. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.19035>
- Siregar, A. I., Islam, U., Sumatera, N., Nawawi, Z. M., Islam, U., Sumatera, N., Fadhilah, N., Hsb, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus di PT . Petrokimia Kayaku (Persero), Tbk Cabang Tanah Karo) Adek Iskandar Siregar Zuhrial M Nawawi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nur Fadhilah Ahm. 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1848>

- Sitio, S. S., Juliati, Y. S., & Kusmilawaty. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dan Kegunaan Informasi Akuntansi. *JREA: Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 267–277. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.1036>
- Subhi, G. N., & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Equity*, 24(2), 141–156. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2468>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Tabel 1 Temuan Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian

| Tujuan Penelitian | Temuan Penelitian |
|--|--|
| Menganalisis/mengevaluasi implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya | Sistem akuntansi berbasis akrual telah diterapkan dengan integrasi aplikasi SIPD, tetapi masih terdapat kendala teknis seperti server error dan koneksi internet yang tidak stabil, serta keterbatasan dalam pencatatan realisasi fisik dan penggunaan CALK. |
| Mengidentifikasi faktor penghambat optimalisasi sistem (kendala teknis dan administratif dalam implementasinya) | Kendala utama mencakup keterbatasan pelatihan pegawai, infrastruktur TI yang kurang memadai, serta perubahan kebijakan yang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem operasional BKPSDM. |
| Menilai dampak penyesuaian anggaran dan struktur program terhadap kualitas pelaporan keuangan | Penurunan anggaran dari Rp6,717 miliar pada 2021 menjadi Rp4,121 miliar pada 2024, serta pengurangan jumlah program dari tiga menjadi dua, berpengaruh terhadap efisiensi dan struktur pelaporan keuangan, meskipun transparansi tetap terjaga. |
| Memberikan rekomendasi atau strategi untuk meningkatkan efektivitas sistem akuntansi melalui peningkatan pelatihan pegawai, infrastruktur TI, dan manajemen keuangan | Diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk pegawai, modernisasi infrastruktur TI guna mengurangi gangguan teknis, serta optimalisasi kebijakan akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. |